

Judul : Banyak Korupsi Anggaran Libatkan Mafia
Tanggal : Rabu, 09 Mei 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

BANYAK KORUPSI ANGGARAN LIBATKAN MAFIA

Kongkalikong pemerintah dan DPR bermula dari proposal pihak swasta.

Maya Ayu Puspitasari
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Hasil pemetaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus rasuah melibatkan makelar anggaran. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan ada beragam modus yang digunakan mafia anggaran untuk memainkan duit rakyat. Polanya serupa: melibatkan kementerian teknis, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pihak swasta. "Biasanya swasta mempengaruhi kementerian atau DPR. Kalau ada pertemuan antara DPR dan kementerian, biasanya sudah ada proposal dari swasta," kata Febri di Jakarta, kemarin.

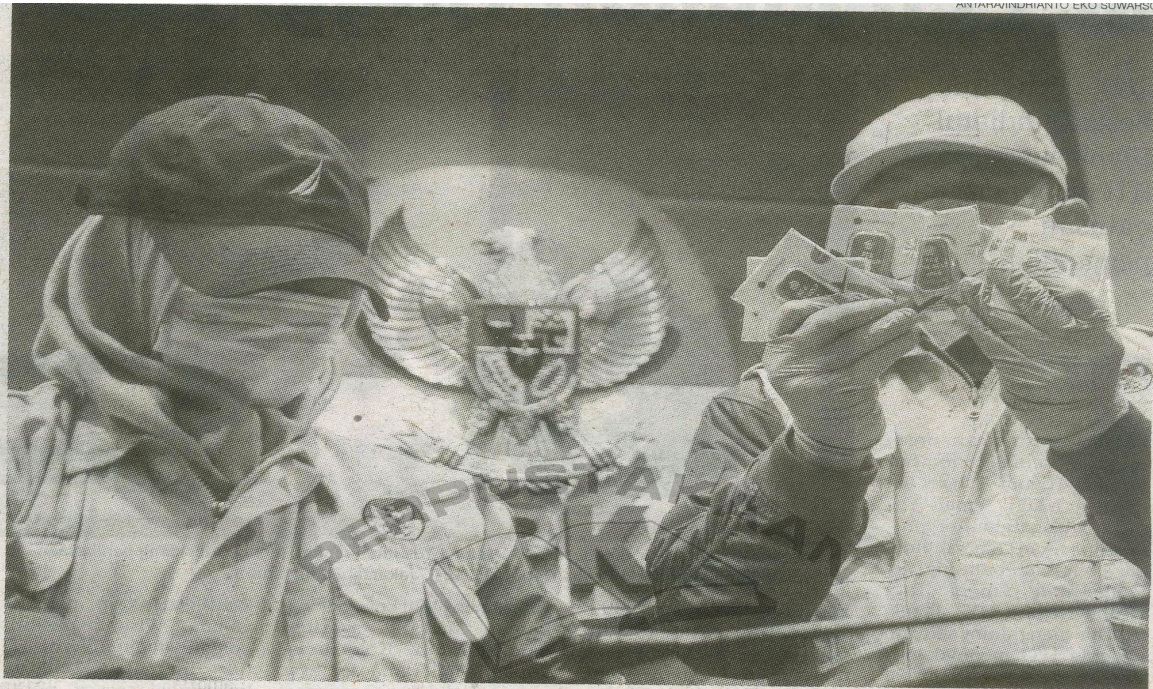
Dari beragam kasus, transaksi biasanya terjadi ketika DPR sedang memproses pembahasan anggaran. Namun, kata Febri, sudah ada pesanan-pesanan pengadaan barang atau jasa sejak awal. "Ada modus untuk meloloskan anggaran tertentu hingga bisa diproses dan diloloskan sampai diatur di tingkat implementasi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Sejak 2007, ada 11 kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digarap KPK. Sepuluh kasus terungkap ketika sudah memasuki proses pembahasan anggaran di DPR.

Dalam kasus terakhir, Komisi mengungkap ada transaksi yang terjadi sebelum proses pembahasan. Ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kedekatan dan akses terhadap anggota DPR dan pejabat Kementerian Keuangan untuk menyerahkan proposal agar masuk pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2018.

Kasus terbaru ini melibatkan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono; Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo; perantara, Eka Kamaluddin; dan kontraktor asal Sumedang atau pemberi suap, Ahmad Ghiast. Keempat orang yang ditangkap pada 5 Mei lalu ini diduga terlibat suap pembahasan RAPBN-P 2018, terutama yang berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan senilai Rp 4 miliar serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumedang senilai Rp 21,85 miliar.

KPK mensinyalir adanya pejabat Kementerian Keuangan lain yang terlibat. Sebab, menurut Febri, Yaya Purnomo tak memiliki wewenang untuk meloloskan usulan anggaran



Penyidik KPK menunjukkan barang sitaan saat konferensi pers atas operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR, Amin Santono, di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

“Ada modus untuk meloloskan anggaran tertentu hingga bisa diproses dan diloloskan sampai diatur di tingkat implementasi pengadaan barang dan jasa.”

daerah. Febri mengatakan lembaganya bakal mengupayakan kasus korupsi anggaran masuk strategi nasional pemberantasan korupsi. Sebab, APBN merupakan duit rakyat yang rentan tak dapat disalurkan dengan baik jika sejak awal sudah bermasalah. “KPK akan mengatur strategi pencegahan agar tidak bolong lagi,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan bahwa ada sejumlah pegawai di lembaganya yang kerap menjadi makelar anggaran bagi kepala dan

pejabat daerah. Mereka diduga menjual janji untuk meloloskan sejumlah pos dana dalam APBN dengan imbalan *fee*. Menurut dia, para makelar itu banyak membidik pejabat baru dari pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur. “Pemda yang baru terbentuk atau kepala daerah yang baru terpilih biasanya memiliki tradisi datang ke Kementerian Keuangan,” katanya. Menteri Sri juga mengaku pernah mendengar ada satu ruangan di Kementerian Keuangan yang dipakai sebagai tem-

pat praktik percaloan anggaran. (*Koran Tempo* edisi Selasa, 8 Mei 2018)

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mendorong pemerintah membuat sistem yang transparan dalam perencanaan APBN untuk meminimalkan kongkalikong antara pemerintah dan DPR. “Kami juga mendorong KPK menyelidiki tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi RAPBN-P 2018,” ujarnya.

● FRANCISCO ROSARIANS | ADAM PRIREZA